



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHMAD DJAMHARI
2. Jabatan : KEPALA PUSAT
3. NHK : 101919

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.920.961.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/126 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 495.600.000
2. Tanah Seluas 1507 m² di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 470.000.000
3. Tanah Seluas 714 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 332.000.000
4. Tanah Seluas 1050 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 241.500.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m²/50 m² di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 287 m²/139 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 456.261.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 289 m²/27 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
8. Tanah Seluas 165 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 148.500.000
9. Tanah Seluas 319 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 287.100.000
10. Tanah Seluas 420 m² di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 275.000.000



1. MOTOR, HONDA ASTREA GRAND SEPEDA MOTOR Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
3. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
4. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 241.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 7.852.832

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.207.313.832

III. HUTANG Rp. 519.280.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.688.033.832

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.